

Al Washliyah dan Dinamika Politik Era Orde Baru

Ja'far¹, Taufiqul Hadi², Nur Sari Dewi. M³, Muthmainnah⁴, Amer Hudhaifah Hamzah⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

⁵ Fakultas Pengajian Islam, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia

Email : jafar@uinsuna.ac.id¹, taufiqulhadi@uinsuna.ac.id², nursaridewi@uinsuna.ac.id³,
muthmainnah@uinsuna.ac.id⁴, amerukun@ums.edu.my⁵

Abstrak

Artikel ini mengkaji dinamika politik Al Jam'iyatul Washliyah pada masa Orde Baru (1966–1998) dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif melalui penelitian kepustakaan. Sebagai organisasi Islam tertua di luar Jawa, Al Washliyah menghadapi tantangan besar di tengah kebijakan politik represif dan sentralistik rezim Soeharto, khususnya terkait penerapan asas tunggal Pancasila. Studi ini menelusuri enam aspek utama: konsepsi politik Al Washliyah, sikap politik para tokohnya, peran dalam kejatuhan Orde Lama, keterlibatan dalam pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), penerimaan asas tunggal, serta posisi organisasi menjelang akhir Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al Washliyah menampilkan corak politik Islam yang moderat, inklusif, dan adaptif, dengan menempatkan politik sebagai bagian dari dakwah dan amal kebangsaan, bukan perebutan kekuasaan. Sikap ini menegaskan peran Al Washliyah sebagai kekuatan moral yang menjaga independensi, memelihara hubungan strategis dengan negara, dan berkontribusi pada keutuhan bangsa.

Kata Kunci: *Al Washliyah, Orde Baru, Orde Lama, Partai politik, Politik Islam.*

Al Washliyah and the Political Dynamics of the New Order Era

Abstract

This article examines the political dynamics of Al Jam'iyatul Washliyah during Indonesia's New Order period (1966–1998) using a historical-descriptive approach based on library research. As the oldest Islamic organization outside Java, Al Washliyah faced major challenges under the repressive and centralized political policies of Suharto's regime, particularly regarding the enforcement of Pancasila as the sole ideological foundation (asas tunggal). The study explores six key aspects: the organization's political conception, the political attitudes of its leaders, its role in the downfall of the Old Order, its involvement in the formation of the Indonesian Muslim Party (Parmusi), its acceptance of the asas tunggal policy, and its position toward the end of the New Order era. The findings reveal that Al Washliyah exhibited a moderate, inclusive, and adaptive form of Islamic politics, viewing political engagement as part of its da'wah mission and national service rather than a pursuit of power. This stance underscores Al Washliyah's role as a moral force that maintained independence, sustained strategic relations with the state, and contributed to national cohesion.

Keywords: *Al Washliyah, New Order, Old Order, Political parties, Islamic politics.*

PENDAHULUAN

Sejarah politik Islam di Indonesia selalu diwarnai oleh dinamika hubungan antara negara, kekuasaan, dan organisasi keagamaan. Dalam konteks ini, Al Jam'iyatul Washliyah merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki peran penting dan khas. Berdiri pada tahun 1930 di Medan (Sjamsuddin, 1951; Sjihab, 1951), Al Washliyah sejak awal mengemban misi pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan perjuangan kebangsaan (Siddik & Rosnita, 2014). Sebagai organisasi Islam tertua di luar Jawa yang bertahan hingga kini, Al Washliyah tidak hanya hadir sebagai lembaga sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari perjalanan politik Islam di Indonesia (Rasyidin, 2016). Pengalaman panjang organisasi ini, terutama pada masa Orde Baru (1966–1998), memberikan gambaran menarik tentang bagaimana ormas Islam bernegosiasi dengan kekuasaan tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Masa Orde Baru merupakan periode yang menantang bagi Al Washliyah. Pemerintahan Soeharto menegakkan sistem politik yang menuntut stabilitas nasional dan keseragaman ideologis melalui kebijakan asas tunggal Pancasila. Dalam situasi politik yang sentralistis dan represif ini, Al Washliyah menghadapi dilema antara mempertahankan idealisme Islam dan menyesuaikan diri dengan tuntutan rezim agar dapat terus eksis. Sikap politik Al Washliyah yang moderat dan realistis tercermin dari cara organisasi ini memandang politik sebagai bagian dari amal usaha, bukan sebagai ajang perebutan kekuasaan (Ja'far et al., 2022; Syahnan et al., 2021; Syahnan & Azmi Ahmad, 2023; Syahnan & Ja'far, 2021).

Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah kembali peran politik Al Washliyah dalam enam dimensi utama. Pertama, melalui studi tentang Al Washliyah dan politik, dijelaskan bahwa organisasi ini memandang politik dalam dua ranah: politik kebangsaan dan politik praktis. Kedua, pembahasan tentang sikap politik Al Washliyah memperlihatkan keseimbangan antara dakwah dan keterlibatan politik melalui tokoh-tokohnya. Ketiga, bagian tentang Al Washliyah dan kejatuhan Orde Lama menyoroti peran tokoh Al Washliyah dalam menegaskan sikap Islam terhadap kekuasaan yang menyimpang. Keempat, keterlibatan Al Washliyah dalam pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menunjukkan kesinambungan perjuangan politik Islam pasca pembubaran Masyumi. Kelima, persoalan asas tunggal dan independensi menjadi ujian ideologis yang menentukan posisi Al Washliyah di tengah tekanan negara. Terakhir, bagian Al Washliyah di ujung Orde Baru menampilkan bagaimana organisasi ini menjaga hubungan strategis dengan pemerintah tanpa kehilangan otonomi moralnya.

Dengan menguraikan keenam aspek tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa Al Washliyah mampu menampilkan corak politik Islam yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui pendekatan historis-analitis, artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana Al Washliyah menegosiasikan relasi agama dan negara selama masa Orde Baru serta meneguhkan perannya sebagai kekuatan moral dan sosial yang berkontribusi terhadap keutuhan bangsa dan kemajuan Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan historis-deskriptif. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, arsip, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah sebagai bahan utama untuk memperoleh data (Zed, 2018). Penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan, melainkan dengan menelusuri berbagai data tertulis yang berkaitan dengan aktivitas dan sikap politik Al Jam'iyatul Washliyah selama masa Orde Baru (1966–1998). Pendekatan historis (Kuntowijoyo, 2013) digunakan untuk merekonstruksi secara kronologis perjalanan politik Al Washliyah, mulai dari masa transisi kejatuhan Orde Lama, keterlibatannya dalam pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila, hingga sikap organisasi di penghujung Orde Baru. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menafsirkan dinamika hubungan antara Al Washliyah dan rezim Soeharto dalam konteks kebijakan politik, ideologi negara, serta upaya organisasi dalam menjaga independensi dan peran sosial-keagamaannya. Sumber data penelitian ini terdiri dari: Sumber primer, berupa dokumen organisasi, serta tulisan tokoh-tokoh Al Washliyah seperti M. Arsjad Th. Lubis, Udin Sjamsuddin, dan Bahrum Djamil. Sumber sekunder, meliputi buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, biografi tokoh, serta berita surat kabar dan majalah pada masa Orde Baru. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap teks dan dokumen yang berkaitan dengan tema politik Al Washliyah. Analisis dilakukan dengan menelusuri tema, konsep, dan pola sikap politik organisasi ini secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman historis yang utuh mengenai strategi adaptasi dan posisi ideologis Al Washliyah dalam percaturan politik Orde Baru (Krippendorff, 1980).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi tentang Al Washliyah dan Politik

Kajian tentang hubungan antara Al Jam'iyatul Washliyah dan politik, terutama pada masa Orde Baru (1966–1998), relatif jarang dilakukan dibandingkan penelitian tentang gerakan politik ormas besar lainnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Ja'far, 2019b). Beberapa peneliti memang pernah menulis tentang politik Al Washliyah, namun sebagian besar karya tersebut bersifat normatif dan minim data historis karena keterbatasan sumber primer. Padahal, studi mendalam tentang politik Al Washliyah penting dilakukan untuk memahami ideologi dan orientasi gerakan politik yang pernah berkembang dalam tubuh organisasi ini. Sejak berdirinya pada tahun 1930, Al Washliyah secara tegas menyatakan diri bukan partai politik. Namun, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara Al Washliyah dan dunia politik tidak dapat dipisahkan sepenuhnya.

Tujuan dari studi ini ialah menelusuri corak ideologi dan orientasi politik Al Washliyah sebagaimana diwariskan oleh para pendirinya. Pemahaman terhadap hal ini penting agar menjadi teladan bagi pengurus Al Washliyah masa kini dalam menjaga keseimbangan antara gerakan dakwah, pendidikan, dan keterlibatan sosial-politik. Politik bagi Al Washliyah tidak selalu diartikan sebagai perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi politik Al Washliyah pada masa Orde Baru dapat ditinjau dari dua ranah besar: politik kebangsaan (*high politics*) dan politik praktis (*low politics*). Politik kebangsaan adalah keterlibatan Al Washliyah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyadarkan rakyat akan hak dan kewajibannya, serta membela masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam ranah ini, Al Washliyah menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral bangsa. Sementara itu, politik praktis berkaitan dengan kekuasaan, kontestasi, dan pengelolaan pemerintahan—wilayah yang lebih banyak diisi oleh partai politik.

Kajian tentang politik Al Washliyah pada masa Orde Baru bersumber dari dokumen resmi seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan muktamar, keputusan PB dan Dewan Fatwa, biografi tokoh, hasil wawancara dengan pelaku sejarah, serta literatur sejarah dan politik Indonesia. Dari sumber-sumber tersebut tampak bahwa Al Washliyah tidak menutup diri dari dinamika politik nasional. Meskipun tidak menjadi partai politik, kader-kader Al Washliyah sering kali berperan aktif di berbagai partai Islam dan ormas politik.

Sikap Politik Al Washliyah

Pertanyaan pokok yang muncul ialah bagaimana sikap politik Al Washliyah pada masa Orde Baru: apakah anti-politik, apolitis, atau justru memiliki pandangan positif terhadap politik? Dalam rentang waktu antara 1960-an hingga 1980-an, beberapa ulama besar Al Washliyah seperti Adnan Lubis (Thaib & Hasballah, 2012), M. Arsjad Th. Lubis (Harahap, 2021), dan Yusuf Ahmad Lubis (Said, 2012; Said & bin Hj. Mohd Yusoff, 2011; Said & Yusoff, 2013) masih hidup dan memegang pengaruh besar terhadap arah organisasi. Ketiganya berperan dalam menjaga garis perjuangan Al Washliyah agar tetap berpijak pada Islam tanpa kehilangan kepedulian terhadap persoalan politik nasional (Ja'far, 2022).

Sikap Al Washliyah terhadap politik pada masa Orde Baru sejatinya tidak berbeda dengan pada masa Orde Lama. Organisasi ini tetap mempertahankan fungsinya sebagai lembaga sosial-keagamaan dan pendidikan, tanpa menjelma menjadi partai politik. Namun, seperti disebutkan dalam buku peringatan ulang tahun ke-27 Al Washliyah (1957), politik dipandang sebagai bagian dari amal usaha yang dapat dikerjakan umat Islam. Karena itu, tokoh-tokoh Al Washliyah yang memiliki bakat dan minat politik diberi kebebasan untuk bergabung dengan partai Islam dan berperan aktif dalam perjuangan politik nasional (Washlijah, 1959).

Pandangan M. Arsjad Th. Lubis menunjukkan keseimbangan antara dua lapangan perjuangan: lapangan politik dan lapangan pembangunan umat. Menurutnya, perjuangan politik harus berjalan seiring dengan pembangunan dan pembinaan umat Islam melalui pendidikan, tabligh, dan penerbitan. Ia menegaskan bahwa perjuangan politik Islam akan kandas jika tidak disertai dengan pembangunan pendidikan dan pembinaan moral. Dalam pandangan ini, politik bukan satu-satunya jalan perjuangan, melainkan salah satu sarana untuk menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat (M. A. T. Lubis, 1956).

Sementara Nukman Sulaiman, tokoh intelektual Al Washliyah lainnya, menegaskan bahwa Islam mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik sekaligus. Dalam Anggaran Dasar Al Washliyah, tujuan organisasi mencakup upaya mengatur masyarakat, memperbaiki harkat hidup manusia, dan memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Namun, karena luasnya tujuan tersebut, Al Washliyah memilih memusatkan diri pada bidang pendidikan

sebagai prioritas utama. Menurutnya, kemenangan politik tanpa dasar pendidikan akan bersifat sementara. Karena itu, Al Washliyah menempuh jalan dakwah dan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki gelanggang politik secara langsung (Sulaiman, 1968). Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa Al Washliyah bukan organisasi apolitis. Ia menempatkan politik sebagai bagian dari perjuangan Islam yang harus dijalankan secara etis, mendidik, dan berorientasi pada kepentingan umat, bukan sekadar kekuasaan.

Al Washliyah dan Kejatuhan Orde Lama

Menjelang kejatuhan Orde Lama (1965–1966), sejumlah tokoh utama Al Washliyah seperti M. Arsjad Th. Lubis, Udin Sjamsuddin, Adnan Lubis, Bahrum Jamil, dan Muhammad Ali Hanafiah Lubis (Mahals) masih aktif. Mereka merupakan eks-politisi Partai Masyumi, partai yang dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Sejak masa Orde Lama, Al Washliyah berstatus sebagai anggota istimewa Partai Masyumi (Noer, 1973, 1987), sehingga memiliki hubungan historis dan ideologis yang sangat erat dengan partai tersebut.

Kejatuhan rezim Soekarno tentu menjadi perhatian serius bagi para tokoh Al Washliyah. Pada 2–3 Maret 1967, di Medan diadakan Musyawarah Ulama Sumatera Utara yang membahas kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia, hukum kejahatan Soekarno dan antek-anteknya, serta wacana pemilihan umum. Dalam forum itu, M. Arsjad Th. Lubis membacakan makalah berjudul “Kedudukan Kepala Negara RI Ditinjau dari Sudut Hukum Islam.” Ia menjelaskan bahwa kedudukan Bung Karno sebagai kepala negara harus dilihat dari konsep Islam tentang *dzu syaukah*—pemimpin yang memiliki kekuatan dan dukungan rakyat. Menurut Arsjad, ketika *syaukah* itu hilang, maka pemimpin tersebut secara hukum Islam telah makzul (turun jabatan) dengan sendirinya. Berdasarkan pertimbangan itu, ia menyerukan agar Soekarno dimakzulkan melalui Sidang MPRS. Pandangan ini menegaskan sikap politik tegas Al Washliyah dalam menghadapi penyimpangan kekuasaan pada masa Orde Lama (M. A. T. Lubis, 1967). Dengan demikian, Al Washliyah berada di barisan umat Islam yang mendukung transisi menuju pemerintahan baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hukum Islam.

Al Washliyah dan Pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Setelah kejatuhan Orde Lama, Al Washliyah segera menyelenggarakan Muktamar ke-13 di Bandung pada 20–27 Oktober 1966. Salah satu rekomendasi penting dari muktamar ini adalah desakan kepada pemerintah agar merehabilitasi Partai Masyumi, demi penyaluran aspirasi politik umat Islam. Namun, pemerintah Orde Baru menolak rehabilitasi tersebut. Sebagai gantinya, pada tahun 1968 umat Islam mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Tokoh-tokoh Al Washliyah secara aktif terlibat dalam pembentukan Parmusi. Udin Sjamsuddin, Ketua Umum PB Al Washliyah saat itu, menandatangani piagam dukungan terhadap pendirian Parmusi pada 17 Agustus 1967. Di Sumatera Utara, M. Arsjad Th. Lubis, Usman Pelly, Zainal Arifin Abbas, dan N.D. Pane menerima mandat untuk membentuk struktur Parmusi di wilayah tersebut. Sejumlah kader Al Washliyah kemudian menduduki posisi penting di Parmusi, seperti Harun Amin, Anas Tanjung, dan Adnan Benawy.

Meskipun Al Washliyah tidak menjadi anggota istimewa Parmusi seperti halnya hubungan dengan Masyumi, keduanya tetap memiliki kedekatan ideologis dan psikologis. Al Washliyah mendukung perjuangan politik Islam yang diusung Parmusi, tetapi tetap

menjaga jarak sebagai organisasi sosial-keagamaan yang independen. Hal ini menunjukkan kematangan politik Al Washliyah dalam menempatkan diri di tengah sistem politik baru yang dikendalikan oleh rezim Soeharto.

Al Washliyah, Masalah Asas Tunggal dan Independensi

Memasuki dekade 1980-an, Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mewajibkan semua ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini menimbulkan dilema bagi banyak organisasi Islam, termasuk Al Washliyah. Pemerintah bahkan tidak memberikan izin untuk pelaksanaan Muktamar ke-16 Al Washliyah di Jakarta tahun 1986 jika organisasi ini menolak asas tunggal tersebut.

Dalam situasi genting itu, tokoh Al Washliyah yang juga politisi Golkar, H. Aziddin, memainkan peran penting. Ia berhasil meyakinkan pemerintah bahwa Al Washliyah bersedia menerima asas tunggal Pancasila, tanpa meninggalkan prinsip Islam. Meskipun banyak kalangan internal menolak, akhirnya fatwa Syekh Mahmud Syihabuddin menenangkan perdebatan: penerimaan asas tunggal dilakukan demi kelangsungan organisasi, bukan karena perubahan ideologi.

Dalam hasil Muktamar ke-16, diputuskan bahwa Pasal 3 AD/ART tetap menegaskan Al Washliyah berasaskan Islam, sementara Pasal 2 menambahkan bahwa Al Washliyah sebagai organisasi kemasyarakatan berakidah Islam, mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih, dan berpaham Ahlussunnah wal Jama'ah (Ja'far, 2016, 2019a). Keputusan ini menjadi solusi kompromi antara tuntutan pemerintah dan prinsip dasar organisasi.

Pada muktamar ini pula, Al Washliyah menegaskan diri sebagai organisasi independen. PB Al Washliyah kemudian diminta menyusun pedoman resmi tentang makna independensi. Ustaz M. Ridwan Ibrahim Lubis menulis buku yang menjelaskan bahwa Al Washliyah bersifat independen secara kelembagaan, namun memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk berkiprah dalam partai atau ormas lain selama tidak membawa nama Al Washliyah. Menurutnya, jika Al Washliyah bergabung secara struktural dengan partai atau ormas tertentu, maka makna "washliyah" sebagai penghubung justru akan hilang (M. R. I. Lubis, 1986).

Ketua Dewan Fatwa saat itu, Bahrum Djamil, juga menegaskan bahwa independensi berarti Al Washliyah tidak mencampuri politik praktis. Anggota diperbolehkan aktif dalam partai politik sesuai haknya sebagai warga negara, dengan syarat tidak membawa nama organisasi (Djamil, 1992). Prinsip ini diulang oleh H. Hasbullah Hadi dalam sarasehan di Asahan tahun 1990, yang menegaskan: Al Washliyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan politik manapun, namun membuka ruang bagi anggotanya untuk berperan dalam politik secara pribadi. Ia menutup dengan ungkapan terkenal: "Biarlah Al Washliyah ada di mana-mana, tetapi Al Washliyah jangan ke mana-mana" (Hadi, 1990). Ungkapan ini menggambarkan keseimbangan antara keterlibatan sosial politik dan independensi kelembagaan, serta menjadi dasar bagi hubungan Al Washliyah dengan rezim Orde Baru.

Al Washliyah di Ujung Orde Baru

Menjelang akhir pemerintahan Soeharto, hubungan Al Washliyah dengan rezim Orde Baru tampak cukup harmonis. Posisi H. Aziddin, yang merangkap sebagai kader

Golkar sekaligus Sekretaris Jenderal PB Al Washliyah, memperkuat kedekatan tersebut. Ia bahkan kelak menjadi salah satu deklarator Partai Demokrat pada masa Reformasi (Ja'far, 2015).

Menjelang Sidang Umum MPR 1998, Al Washliyah secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Try Sutrisno untuk kembali menjabat sebagai Wakil Presiden. Dalam majalah *Gatra* (No. 4/III, 14 Desember 1996), Al Washliyah digambarkan sebagai salah satu ormas yang mendukung pasangan Soeharto–Try Sutrisno sebagai dwi tunggal. Pada HUT ke-66 Al Washliyah di Medan, acara tersebut dihadiri langsung oleh Try Sutrisno bersama Menteri Agama Tarmizi Taher dan Menteri Pertanian Sjarifuddin Baharsjah. Dalam kesempatan itu, dukungan kepada Try Sutrisno untuk kembali menjadi Wakil Presiden disampaikan secara terbuka, sebagaimana dilaporkan oleh *Ummat* (31 Desember 1996) dan *Kompas* (11 Oktober 1997).

Kedekatan Al Washliyah dengan kalangan militer juga terlihat dari kehadiran Jenderal Feisal Tanjung (Panglima ABRI) dan Jenderal Wiranto (KASAD) pada Mukhtar ke-17 Al Washliyah di Jakarta tahun 1997. Hubungan baik ini memberikan ruang bagi Al Washliyah untuk tetap eksis dan menjalankan aktivitas dakwah, pendidikan, dan sosial di tengah situasi politik yang dikontrol ketat oleh pemerintah.

Sejumlah tokoh Al Washliyah aktif di berbagai partai politik pada masa Orde Baru. Di antaranya: Udin Sjamsuddin (Parmusi), Muhammad Ali Hanafiah Lubis (Parmusi), Bahrum Djamil (Parmusi/PPP), Umaruddin Sjamsuddin (Parmusi/Golkar), Rivai Abdul Manaf (Golkar) Harun Amin (Parmusi/PPP), Muis A.Y. (PPP), Fathi Dahlan (Golkar), Aziddin (Golkar), dan M. Kaoy Syah (PPP). Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa meskipun Al Washliyah sebagai organisasi tidak berpolitik praktis, para kadernya tetap berkontribusi dalam arena politik nasional. Mereka berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan kebijakan publik dalam konteks pemerintahan Orde Baru.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa Al Jam'iyatul Washliyah memiliki corak politik yang moderat, realistis, dan adaptif terhadap dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru. Meskipun bukan partai politik, Al Washliyah tetap menempatkan politik sebagai bagian dari dakwah dan perjuangan kebangsaan. Dalam situasi politik yang dikontrol ketat oleh negara, organisasi ini mampu menjaga keseimbangan antara idealisme Islam dan tuntutan pragmatis rezim. Keputusan menerima asas tunggal Pancasila serta menegaskan independensi organisasi merupakan langkah strategis untuk mempertahankan eksistensi dan ruang gerak dakwah. Keterlibatan kader-kadernya dalam berbagai partai Islam dan Golkar memperlihatkan keluasan pandangan politik Al Washliyah yang tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman. Studi ini menunjukkan bahwa posisi Al Washliyah sebagai kekuatan moral mengembangkan konsep politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Kajian ini memperkaya studi politik Islam Indonesia dengan menampilkan model hubungan agama dan negara yang bersifat inklusif dan kontekstual di luar arus besar NU dan Muhammadiyah. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada kurangnya sumber dari kesaksian lisan dari pelaku sejarah masa Orde Baru. Oleh karena itu, studi lanjutan diperlukan dengan pendekatan sejarah lisan (*oral history*) dan analisis kebijakan agar dinamika politik Al Washliyah dapat dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, B. (1992). *Batu Demi Batu Di Bawah Panas Yang Terik Kami Dirikan UISU*. Ma'had Muallimin Al Washliyah Teladan.
- Hadi, H. (1990). *Independensi Alwashliyah sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam*.
- Harahap, M. I. (2021). Nationalism and Political Thoughts of Sheikh M. Arsjad Thalib Lubis (1908-1972). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 45(1).
- Ja'far, J. (2015). *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah 1930-2015*. Perdana Publishing.
- Ja'far, J. (2016). Peran Al Jam'iyatul Washliyah Dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i Di Era Kontemporer. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 13(1).
- Ja'far, J. (2019a). Al Jam'iyatul Washliyah dan Pelestarian Akidah Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1).
- Ja'far, J. (2019b). Pemikiran Politik Islamisme Moderat Al Jam'iyatul Washliyah. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(2), 191–222. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i2.1762>
- Ja'far, J. (2022). *Jejak Sang Bintang: Sketsa Biografis Syekh Hasan Ma'sum H. Ismail Banda, H. Abdurrahman Sjihab H.M. Arsjad Th. Lubis & H. Yusuf Ahmad Lubis* (I. Batubara (ed.)). Centre For Al Washliyah Studies (Pusat Kajian Al Washliyah).
- Ja'far, J., Syahnan, M., Asrul, A., Dahlan, Z., & Ritonga, S. (2022). Discovering the Legacy of Mandailing Ulama: Education, Intellectuals, and Politics in North Sumatra in the Early 20th Century. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 26(2), 296–336.
- Krippendorff, K. H. (1980). *Content Analysis*. Sage Publication, Inc.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lubis, M. A. T. (1956). Pendirian Al Djamiyatul Washlijah. In *Peringatan Al Djamiyatul Washlijah ¼ Abad*. Pengurus Besar Al Djamiyatul Washlijah.
- Lubis, M. A. T. (1967). *Kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia: Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*. Pustaka UNIVA.
- Lubis, M. R. I. (1986). *Kepribadian Anggota dan Pengurus Besar Al Washliyah IV (Wajah Al Washliyah)*. Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah.
- Noer, D. (1973). *The modernist muslim movement in Indonesia, 1900-1942*. Oxford University Press.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Grafiti Press.
- Rasyidin, A. (2016). Islamic Organizations in North Sumatra: The Politics of Initial Establishment and Later Development. *Journal of Indonesia Islam*, 10(01), 63–88.
- Said, K. (2012). *Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus*. Universiti Malaya.
- Said, K., & bin Hj. Mohd Yusoff, Z. (2011). Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis di Indonesia: Analisis Berdasarkan korpus. In *Tajdid and Islah*. Department of Islamic History and Civilization Academy of Islamic Studies University of Malaya.
- Said, K., & Yusoff, Z. M. (2013). Yusuf Ahmad Lubis dan Gagasan Pembangunan Jati Diri Umat. *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V: Ulama Dan Cabaran Idealisme Semasa. Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam*.
- Siddik, D., & Rosnita, R. (2014). Gerakan Pendidikan al-Washliyah di Sumatera Utara. *Ulumuna*, 18(2).

- Sjamsuddin, U. (1951). Tjaketan Ringkas dari Sedjarah Perkembangan Organisasi Al Djam. Washlijah. In *21 Tahun Al Dj. Washlijah* (pp. 21–24). Pustaka Al Washlijah.
- Sjihad, A. (1951). Memperingati Al Djamijatul Washlijah 21 Tahun. In *21 Tahun Al Dj. Washlijah* (pp. 1–20). Pustaka Al Washlijah.
- Sulaiman, N. (1968). *Al Washlijah*. Pustaka Azizi.
- Syahnan, M., & Azmi Ahmad. (2023). East Sumatra and South Tapanuli Ulama on Religious Sciences at the Turn of the 20th Century. *Nahrasiyah: Journal of Aceh and Malay Archipelago Heritage*, 1(1 SE-Articles), 18–38. <https://doi.org/10.47766/nahrasiyah.v1i1.1859>
- Syahnan, M., & Ja'far, J. (2021). Examining Religious Moderation Of The Al Jam'iyatul Washlijah Fatwa Council. *Journal of Indonesian Islam*, 15(1).
- Syahnan, M., Ja'far, J., & Iqbal, M. (2021). Ulama and Radicalism in Contemporary Indonesia: Response of Al Washlijah's Ulama on Radicalism. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 89–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19684>
- Thaib, M. H., & Hasballah, Z. (2012). *Mengenal Almarhum al-Fadhil H. Adnan Lubis: Kader Nadwatul Ulama India*. Perdana Publishing.
- Washlijah, P. B. A. D. (1959). *Memperingati Ulang Tahun Al Washlijah ke-27*. Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.